

**DARI REHABILITASI MENUJU AKSI ADVOKASI;
Evaluasi Partisipatoris terhadap Pelatihan Pendampingan Komunitas
Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Oleh Fathur Rahman
Dosen BK FIP UNY**

Abstract

The objective of this research were to scrutinize the following problems; 1) to describe the impact of materials and training method on attitude changes and critical consciousness of difabel volunteers. 2) to explore how the volunteer's experience by analyzing their reflection on training program. 3) to describe the means of action plan and their implementation. There are several conclusions that can be drawn from the study. The first conclusion is that the training program involved materials and participating training methods gave a positive contribution to the attitude change of volunteer in understanding of shifting paradigm of rehabilitation to advocacy. It can be seen at an integrated and cohesive system of training that is designed to interact each other. Second, research findings show that the volunteer learned something practical that connects to their everyday activities. because the learning is experiential as the difabel partner, they not only learn about counseling and paralegal skills but also they learn how disability and its stigmatization are structural. Third, the action plans and follow-up program designed by volunteers can be concluded as one of successful indicators of training program. The action plans were conducted by volunteers includes dissemination activities, policy advocacy, building teamwork, & cases conference.

Keywords : participatory evaluation, social support program based on advocacy, difabel.

PENDAHULUAN

Studi ini dirancang atas dasar kondisi objektif yang dihadapi oleh pendamping difabel selama ini. Beberapa kajian menjelaskan bahwa kapasitas pendamping difabel dan peran organisasi non-pemerintah dalam memahami perubahan-perubahan paradigma pendampingan difabel masih sangat minim (Fakih, 1996). Perlu diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pendulum wacana model pendampingan dan diskursus tentang kecacatan itu sendiri telah mengalami pergeseran paradigma.

Masyarakat awam selama ini menganggap individu-individu yang memiliki kelainan fisik sebagai kelompok masyarakat yang cacat, abnormal, dan berbeda dari individu-individu normal pada umumnya. Stigma berpikir masyarakat yang cenderung mengeksklusikan kelompok penyandang cacat ini secara lebih luas berdampak tidak hanya pada perkembangan psikologis si penyandang cacat yang terhambat, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya

pemenuhan akses-akses sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dampak psikososial yang muncul, seperti rendahnya konsep diri (*self-concept*), persepsi diri yang rendah terutama kaitannya dengan bagaimana individu memandang dirinya dan penampilannya sendiri (*body image*), munculnya reaksi penolakan (*denial*), keadaan depresif, bahkan sampai dengan menarik diri (*withdrawal*) dari pergaulan sosial sehari-hari (Livneh & Antonak, 2005).

Dampak dari cara pandang masalah kecacatan yang berkembang selama ini juga telah mempengaruhi perspesi pengambil kebijakan dan praktisi kecacatan dalam hal implementasi rehabilitasi kecacatan. Tujuan rehabilitasi yang dikembangkan oleh pemerintah adalah untuk melatih individu mencapai level aktivitas fungsional yang maksimal. Sistem konvensional atau yang lebih dikenal dengan rehabilitasi berbasis institusi (*institutional-based rehabilitation*) ini bekerja melalui mekanisme penempatan penyandang cacat dalam institusi yang memberikan pemenuhan makanan yang bergizi, tempat singgah dan berlindung (*shelter home*), pendidikan, dan beberapa pelatihan kerja tertentu. Bahkan, implementasi di Indonesia, para penyandang cacat diberi insentif modal untuk mengembangkan aktivitas kerja yang berorientasi profit, contohnya praktik pijat yang dikelola oleh penyandang tuna netra.

Konsep kecacatan (*disability*) itu sendiri telah mengalami pergeseran dan perubahan makna (World Health Organization, 2004; Bierman, 1997; Altholz & Golensky, 2004). Kecacatan atau disabilitas tidak lagi dipandang sebagai hanya akibat dari kerusakan bagian atau fungsi tubuh, tetapi secara sosial, di kalangan komunitas tertentu telah muncul kesadaran kritis bahwa hambatan-hambatan lingkungan yang membatasi partisipasi penyandang cacat adalah satu-satunya faktor utama yang menyebabkan munculnya pemahaman yang keliru tentang disabilitas. Beberapa kalangan intelektual di Indonesia sendiri telah mengusung istilah “difabel” untuk mengganti istilah disabilitas yang cenderung *judgmental* (Komardjaja, 2005; Fakhri, 1999 dalam Marcoes et. al., 2004).

Istilah rehabilitasi kecacatan juga telah mengalami evolusi makna dari sekadar memberikan bantuan-bantuan yang bersifat fisik menuju ke arah peningkatan partisipasi penuh dalam kegiatan-kegiatan publik. Rehabilitasi sekarang dianggap sebagai suatu proses yang mana si difabel dan pendampingnya

mendiskusikan secara bebas tentang layanan atau program apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi si difabel (World Health Organization, 2004). Dengan demikian, program rehabilitasi tidak lagi berorientasi pada struktur tubuh dan fungsi dari individual, melainkan lebih terfokus pada perspektif sosial yang melibatkan aktivitas dan partisipasi.

Bercermin pada fenomena pergeseran tersebut, yayasan Dria Manunggal dan Rifka Annisa menginisiasi program pelatihan pendampingan difabel yang ditujukan untuk mempromosikan pergeseran diskursus rehabilitasi menuju advokasi dan istilah penyandang cacat itu sendiri. Kembali pada persoalan awal tentang lemahnya kapasitas pendamping difabel, inisiatif Dria Manunggal dan Rifka Annisa telah memfasilitasi proses pembentukan kapasitas pendamping melalui beberapa tahap pelatihan pendampingan.

Oleh karena itu studi evaluasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ini: a). Mendeskripsikan dampak materi dan metode pelatihan terhadap perubahan sikap dan kesadaran kritis pendamping, b). mengeksplorasi lesson learned atau pengalaman berharga pendamping dengan cara menganalisis refleksi mereka terhadap program pelatihan, dan 3). Mendeskripsikan rencana aksi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dan strategi implementasinya.

Pemaknaan kecacatan mengandung banyak definisi dan implikasi yang berbeda. Kerangka teoretis tentang kecacatan yang digunakan dalam studi ini mengacu pada beberapa definisi, yaitu *disability*, *handicap*, dan *impairment*. Secara tradisional, istilah kecacatan mengandung arti seseorang yang dianggap oleh masyarakatnya sebagai orang yang tidak mampu karena berbeda dalam penampilan dan perilaku (Bierman, 1997; 23).

Menurut kajian yang dilakukan oleh Helander (Bierman, 1997), pemahaman tradisional tentang kecacatan ini memiliki implikasi sosial yang berbeda. Dalam struktur masyarakat tertentu, seseorang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut cenderung dikucilkan (*socially excluded*). Sebaliknya, bisa saja terjadi masyarakat yang lain justru menganggap seseorang tersebut sebagai orang yang normal. Oleh karena itu, menurut Helander (Bierman, 1997) pemahaman tradisional tentang

konsep kecacatan perlu didefinisikan, karena interpretasi yang muncul dalam masyarakat bias kepentingan.

Selama tahun 1970-an terdapat reaksi yang kuat dari kalangan perwakilan organisasi-organisasi penyandang cacat dan para profesional dalam bidang kecacatan. Mereka menentang istilah disabilitas dan *handicap* yang sering dipergunakan secara tidak jelas dan membingungkan, yang tidak memberikan pedoman yang baik bagi pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan tindakan politik. Peristilahan tersebut terlalu menekankan pendekatan medis dan diagnostik, serta mengabaikan sisi positif perkembangan psikologis individu (Resolusi PBB No.48/96 tahun 1993).

Salah satu kritik keras terhadap meluasnya penggunaan istilah penyandang cacat datang dari Yogyakarta yang dimotori oleh Mansour Fakih (Marcoes, Juliantara & Wahono, 2004). Fakih menjelaskan bahwa anggapan umum tentang penyandang cacat selama adalah hasil dari suatu konstruksi sosial (*socially constructed*). Sebagai hasil dari sebuah proses konstruksi secara sosial, istilah kecacatan selama ini mengandung bias baik dan buruk atau normal dan tidak normal. Ia mencontohkan orang yang tidak memiliki kaki karena suatu kecelakaan, misalnya, lantas dianggap cacat dan berdampak pada meluasnya anggapan di kalangan masyarakat awam bahwa orang yang cacat kakinya berarti dicap sebagai individu yang tidak mampu (*disabled person*) melakukan berbagai aktivitas yang mensyaratkan organ kaki. Realitas yang sebenarnya, bukan berarti ia tidak mampu. Apa yang dibutuhkan hanyalah alat bantu agar ia menjadi mampu melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Fakih (Marcoes, Juliantara & Wahono, 2004) mengusulkan untuk mengganti istilah *disable* menjadi *diffable* (*different ability*). Penyandang cacat bukan berarti tidak mampu (*disabled person*), tetapi hanyalah berbeda kemampuannya dengan yang lain (*difable*).

Salah satu variabel penting yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sejauhmana peserta pelatihan (pendamping difabel) merefleksikan dan mengevaluasi proses perubahan sikap dan pembentukan sikap baru dalam kaitannya dengan kegiatan pelatihan yang telah dilalui. Usaha mengenali perubahan dan pembentukan sikap ini juga tidak terlepas dari tujuan pelatihan pada umumnya yang menghendaki terjadinya perubahan sikap dalam diri

individu. Dua teori utama yang dijadikan pijakan teoretis untuk menganalisis perubahan sikap ini adalah teori pesan-belajar (*the message-learning theory*) dan teori respon kognitif (*cognitive response model*).

Salah satu riset awal dan paling berpengaruh dalam perubahan sikap adalah penelitian yang dilakukan oleh Hovland, Janis, dan Kelley (Manstead & Hewstone, 1996; Atkinson, Atkinson & Hilgard, 1983). Riset mereka mengindikasikan pendekatan belajar melalui pesan (komunikasi persuasif) atau lazim dikenal dengan istilah *message-learning approach*. Mereka memperkenalkan empat variabel independen dalam pendekatan ini, yaitu sumber (komunikator), pesan, penerima pesan (komunikan), dan perantara pesan. Faktor sumber (komunikator) dapat terdiri dari individu, suatu kelompok, atau institusi. Perubahan-perubahan sikap yang terjadi dalam diri si penerima pesan sangat dipengaruhi oleh atribut-atribut atau kredibilitas yang melekat dalam diri si sumber pesan, yakni tingkat keahlian, tingkat kepercayaan, dan daya tarik. Keahlian dan kecakapan seseorang dalam bidang tertentu memberikan nilai tambah dalam pesan yang ingin disampaikan dan menambah tingkat kepercayaan orang yang menerima pesan. Begitu pula halnya atribut daya tarik; orang yang memiliki daya tarik tinggi biasanya semakin disukai dan cenderung dijadikan model percontohan untuk sikap dan perilaku tertentu.

Sama halnya dengan pendekatan sebelumnya, metode respon kognitif (*cognitive response model*) juga sangat menekankan pentingnya proses belajar dalam perubahan sikap. Studi yang dilakukan oleh Greenwald (Manstead & Hewstone, 1996) lebih lanjut menyimpulkan bahwa konten atau isi respon kognitif seseorang jauh lebih penting daripada isi pesannya itu sendiri. Inilah yang membedakan model pesan dengan model respon secara kognitif. Model yang diajukan oleh Greenwald ini mengakui bahwa subjek penerima pesan (*recipients*) adalah prosesor aktif suatu informasi yang berperan menghubungkan isi suatu pesan terhadap keyakinan dan perasaannya yang telah ada sebelumnya. Respon kognitif terjadi manakala muncul dialektika batin antara isi pesan dan sikap sebelumnya yang telah ada yang pada akhirnya melahirkan pikiran-pikiran dan ide-ide yang relatif baru.

CARA PENELITIAN

Berdasarkan purposivitas sampel yang digunakan, penentuan unit analisis penelitian ini diarahkan pada latar pelatihan pendampingan difabel yang diselenggarakan oleh Dria Manunggal dan Rifka Annisa. 10 orang responden dipilih sebagai subjek penelitian dalam kelompok terfokus (*focus group*). Tiga diantaranya kemudian diwawancarai secara terpisah. Ketiga responden yang dimaksud merepresentasikan tiga latar belakang profesional yang berbeda, yakni konselor sekolah, guru sekolah luar biasa (SLB), dan relawan pendamping.

Terkait dengan tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan, desain penelitian merupakan desain penelitian evaluasi partisipatoris yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai basis analisis dan interpretasi data. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi kuesioner tertutup, wawancara semi terstruktur, observasi partisipan, dan kelompok terfokus (*focus group*). Pada tahap analisis data, peneliti melakukan modifikasi tertentu, yakni data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Data ini dimanfaatkan untuk memperkaya dan mendukung hasil penelitian, di samping memanfaatkan hasil evaluasi pelatihan yang nyaris tidak terpakai. Sementara itu, data-data kualitatif lainnya dianalisis dengan bantuan model alir dan interaktif sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan olah data hasil angket evaluasi selama pelatihan berlangsung, jumlah peserta pelatihan adalah 23 orang, yakni terdiri dari peserta laki-laki sejumlah 5 orang (21.7%) dan peserta perempuan sebanyak 18 orang (78.3%). Peserta pelatihan pendampingan difabel memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bervariasi. Peserta dengan latar belakang pendidikan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) merupakan jumlah terbesar dari latar belakang lainnya, yakni 39.1%. Jumlah peserta yang berlatar belakang sarjana Pendidikan Luar Biasa (PLB) sebanyak 30.4%, peserta dengan latar belakang sarjana psikologi dan konseling sebanyak 17.4%, dan sejumlah 13% termasuk dalam kategori sarjana umum, seperti sarjana hukum dan ekonomi.

Tabel 1. Respon Pendamping terhadap Pelatihan

NO	ITEM	KATEGORI RESPON				
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Alokasi Waktu	-	43.5%	43.5%	13%	-
2	Tempat Pertemuan	-	-	30.4	69.6%	-
3	Fasilitas pertemuan	-	-	39.1%	60.9%	-
4	Relevansi antar-materi	-	-	47.8%	52.2%	-
5	Organisasi dan Sistematika Materi	-	-	39.1%	60.9%	-
6	Penjelasan Fasilitator	-	-	8.7%	91.3%	-
7	Kemampuan fasilitator membangkitkan minat	-	-	13%	87%	-
8	Kesempatan berbagi ide dan pengalaman	-	-	34.8%	65.2%	-
9	Kesempatan berbagi pengalaman dengan fasilitator	-	-	17.4%	82.6%	-
10	Manfaat Kegiatan	-	-	8.7%	91.3%	-

Sebagian besar penilaian dan respon pendamping terhadap pelatihan berdasarkan tabel tersebut terkonsentrasi pada kategori penilaian baik. Walaupun kuesioner yang dibuat tidak mengikuti alur penyusunan dan pengembangan instrumen pada umumnya, setidaknya pernyataan-pernyataan yang menggambarkan berbagai aspek dalam pelatihan dapat terwakili dalam kuesioner ini.

Tabel 2. Kategori Norma Evaluasi Pelatihan

No	Kategorisasi	Norma	Frekuensi	Persen (%)
1	Rendah	$X \leq 23.34$	0	0
2	Sedang	$23.34 \leq X \leq 36.66$	16	69.6
3	Tinggi	$X > 36.66$	7	30.4
	Total		23	100

Berdasarkan kategori normatif pada tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar peserta menilai bahwa pelatihan secara keseluruhan dapat disebut

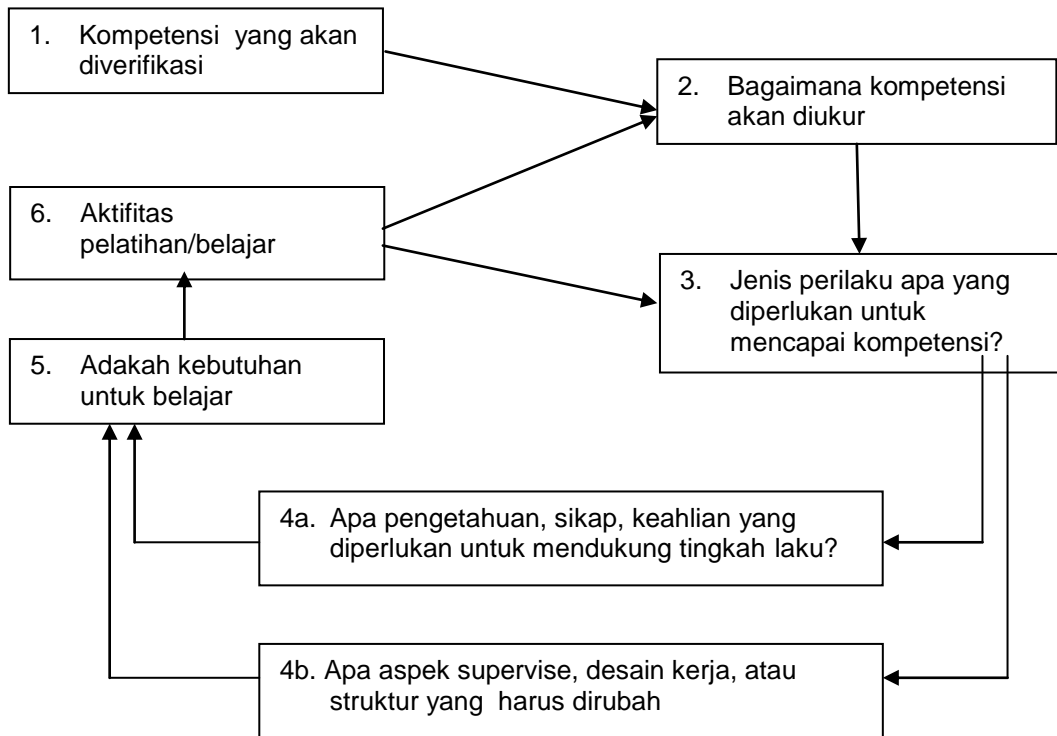
sedang (69.6%). Tidak satupun dari peserta pelatihan menilai rendah dan sisanya sejumlah 30.4% memberikan evaluasi yang tinggi terhadap pelatihan tersebut.

Metode merupakan salah satu subsistem dalam sistem pelatihan keseluruhan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa observasi selama aktivitas pelatihan berlangsung, penulis mendeskripsikan metode pelatihan yang digunakan dalam beberapa tahap pelatihan tersebut sebagai metode pelatihan partisipatoris dengan visi andragogis di dalamnya. Sebagai contoh, modus interaksi fasilitator dengan peserta dapat dijadikan salah satu indikator penerapan metode partisipatoris yang dimaksud. Adapun metode yang dimaksud, yaitu brainstorming, kelompok nominal, diskusi kelompok, dan *role-play* atau simulasi.

1. Dampak Materi Pelatihan terhadap Perubahan Sikap Pendamping

Rangkaian demi rangkaian pelatihan yang didisain oleh tim fasilitator DM dan RAWCC telah menunjukkan bukti kesiapan dan kemampuan kedua lembaga tersebut dalam mendiseminasikan wacana pendampingan advokasi. Kesimpulan logis ini dapat diamati dari asumsi dan perencanaan sebelum pelatihan dilaksanakan. Perencanaan pelatihan yang dibuat menunjukkan kemampuan refleksi kelembagaan yang baik tentang peta permasalahan difabel yang terjadi dewasa ini. Dengan demikian, kemampuan mendesain kegiatan pelatihan atas dasar refleksi persoalan dan kebutuhan sangat bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Suryana (Subiyantara, 2005) bahwa memulai suatu pelatihan harus memperhatikan komponen-komponen apa yang melingkupi perlunya suatu pelatihan (lihat gambar berikut):

Gambar 1
Perencanaan Pelatihan



Secara teoretis kebutuhan belajar melalui suatu proses pelatihan sangat ditentukan tujuan-tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Beberapa kelemahan pokok dalam suatu disain pelatihan seringkali berkaitan erat dengan ketidakjelasan target kompetensi yang ingin dicapai. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya berdampak besar pada relasi yang asimetris antara bentuk didaktik dan metode yang digunakan dalam pelatihan dengan kompetensi yang ingin dicapai (Kim & Lyons, 2003). Menurut Kim dan Lyons, dimensi-dimensi yang terdapat dalam kompetensi mencakup keyakinan dan sikap (*beliefs and attitudes*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*). Pada dimensi keyakinan dan sikap, seorang pendamping yang berkompeten adalah individu yang menyadari nilai-nilai dan bias-bias yang terdapat dalam dirinya sendiri, dan sejauhmana dampaknya terhadap komunitas yang didampingi. Seorang pendamping disebut berkompeten dalam pengetahuan apabila dia memiliki pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang komunitas atau kelompok yang didempinginya. Sementara seorang pendamping yang berkompeten dalam keterampilan dibuktikan dengan

kemampuan dirinya dalam mengaplikasikan keyakinan, sikap, dan pengetahuan yang dimilikinya secara tepat dan akurat.

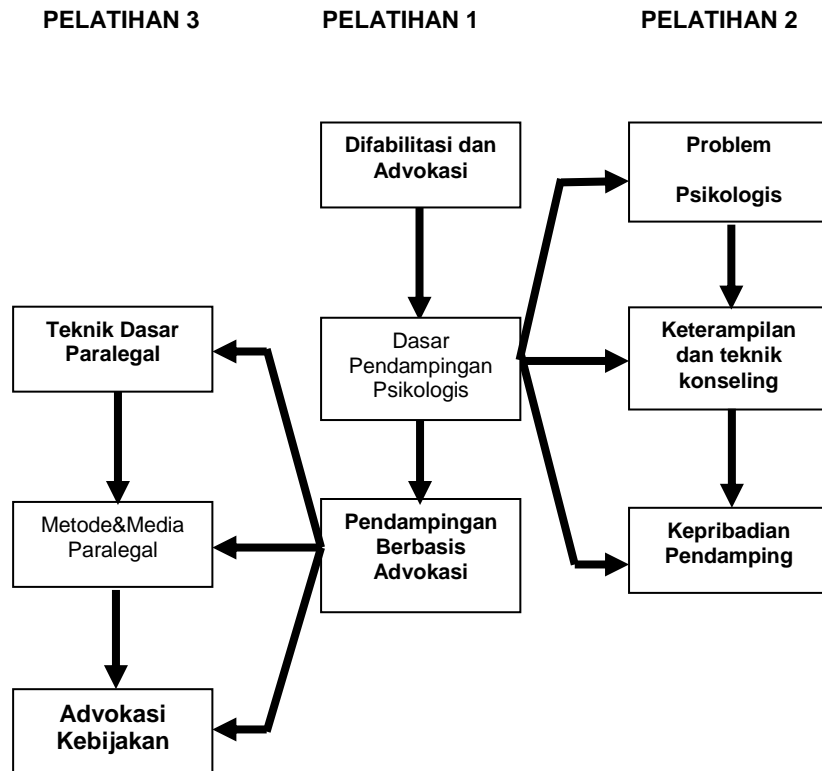
Sesuai dengan pijakan teoretis di atas, pelatihan pendampingan difabel ini telah memenuhi kriteria dan ukuran kompetensi yang ingin dicapai. Dari dimensi keyakinan dan sikap, tim fasilitator dalam pelatihan ingin menegaskan identitas pendamping difabel yang peka terhadap sistem nilai dan norma dalam masyarakat yang cenderung memarginalkan peran dan hak difabel dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengindikasikan kemampuan pendamping dalam mengeksplorasi bias-bias dan stigma yang melekat dalam diri mereka sendiri. Begitu pula halnya dengan pengetahuan dan keterampilan pendamping. Rangkaian pelatihan pendampingan tersebut ingin menciptakan citra dan identitas yang jelas bahwa basis pengetahuan yang hendak dicapai adalah jenis pengetahuan yang memiliki visi keberpihakan terhadap komunitas yang tertindas; bukan beraktivitas untuk pengetahuan itu sendiri.

Evaluasi terhadap suatu pelatihan tertentu selain harus mengeksplorasi proses program yang dilaksanakan, juga harus berorientasi evaluatif terhadap isi program (materi) itu sendiri. Salah satu kegagalan evaluasi dalam mendeskripsikan kriteria efektivitas adalah fungsi evaluasi yang hanya difokuskan pada analisis proses semata-mata (Deacon & Piercy, 2000). Menurut Deacon dan Piercy, gambaran evaluasi pelatihan yang ideal harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu siapa yang mengajar (*who is teaching*), siapa yang diajar (*who is being taught*), apa yang diajarkan (*what is being taught*), dan bagaimana metode pengajarannya (*how is being taught*). Dengan demikian, evaluasi terhadap materi juga harus menjadi prioritas seorang evaluator.

Secara evaluatif, pelatihan ini memberi kesan kuat pada proses dekonstruksi wacana disabilitas dan rehabilitasi dan diseminasi gagasan pendampingan yang berbasis pada aksi advokasi. Gambaran ini dapat dilihat pada materi pelatihan yang didisain dengan alur yang jelas dan mencerminkan watak materi yang bersifat transformatif. Antara satu materi dengan materi yang lain dan pelatihan yang satu dengan yang lain menunjukkan alur materi yang mengalir dan tanpa dibebani oleh beban sub-materi yang terlalu padat, berbeda dengan model pelatihan lainnya yang hanya memprioritaskan banyaknya materi. Tiap-tiap

pelatihan hanya terdiri dari 3 sesi utama dengan jumlah materi yang relatif sedikit, yakni 3 jenis materi pula. Hubungan antar materi dan antar pelatihan ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2
Hubungan Antarmateri Pelatihan



Kaitannya dengan dimensi-dimensi kompetensi yang ingin dicapai, pelatihan pertama diarahkan pada dekonstruksi makna kecacatan dan rehabilitasi yang selama ini dipahami oleh pendamping. Pada alur pelatihan pertama, para pendamping merefleksikan pengalaman-pengalaman dalam mendampingi difabel yang sarat dengan bias dan stigma yang terlanjur dilekatkan baik oleh si pendamping itu sendiri, maupun oleh masyarakat luas. Melalui kemampuan reflektif ini, selain mampu mengenali bias-bias dan nilai dalam pendampingan, mereka juga dapat melihat bagaimana proses stigmasisasi label cacat juga dikonstruksi secara sengaja dengan dukungan struktur politik yang kuat.

Pada pelatihan kedua dan ketiga, para pendamping lebih banyak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis pendampingan difabel. Dilihat dari cakupan dimensi kompetensi yang akan dicapai, pelatihan ini tidak berpretensi menjebak pendamping dalam orientasi wacana atau diskursus disabilitas *vis-a-vis* difabilitas ataupun rehabilitasi *vis-a-vis* advokasi. Dimensi kompetensi berupa keterampilan praktis juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembentukan kompetensi secara utuh. Materi konseling dan pendampingan paralegal diharapkan dapat menjadi metode dan alat yang tepat untuk mengimplementasikan paradigma, kesadaran, dan sikap baru pendamping dalam membantu difabel mengatasi hambatan-hambatan dalam beraktivitas. Melalui keterampilan konseling dasar, para pendamping dimaksudkan dapat membantu difabel mengatasi hambatan-hambatan psikologisnya; masalah penyesuaian diri maupun keluar dari krisis perkembangan. Melalui keterampilan paralegal, difabel pada akhirnya dapat mengakses bantuan semi-hukum atau advokasi kasus dalam menyelesaikan persoalan ataupun hambatan-hambatan hukum dalam mencari keadilan.

Berdasarkan fakta-fakta itu, hasil analisis menemukan keterkaitan yang sangat erat antara komponen materi yang dilatihkan dan digunakan dengan perubahan-perubahan personal yang dicapai oleh pendamping setelah mengikuti pelatihan pendampingan difabel yang dimaksud. Satu alasan kuat yang melatarbelakangi kesimpulan ini dapat diamati pada besarnya prosentase evaluasi peserta terhadap pernyataan tentang relevansi antar materi yang terdapat dalam angket, yaitu 52.2%. Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa capaian-capaian personal pendamping terutama perubahan sikap pendamping yang lebih berpihak pada wacana difabilitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang memadai dalam pelatihan. Fenomena perubahan sikap yang dialami oleh pendamping ini semakin memperkuat teori *the message-learning approach* dan *the cognitive response approach*. Dalam teori pendekatan belajar melalui pesan (*the message-learning approach*) dinyatakan bahwa komunikasi persuasif yang melibatkan empat variabel independen (sumber, pesan, penerima pesan, dan perantara pesan) dapat secara efektif mempengaruhi perubahan sikap seseorang (Manstead & Hewstone, 1996; Atkinson, Atkinson & Hilgard, 1983). Ditinjau

dari variabel-variabel tersebut, pemahaman dan sikap pendamping yang kontra terhadap pendekatan rehabilitasi kecacatan besar kemungkinan memiliki keterkaitan langsung dengan atribut-atribut dan kredibilitas yang melekat dalam diri sumber pesan. Atribut dan kredibilitas yang dimaksud meliputi keahlian, kepercayaan, dan daya tarik. Selain itu, pengaruh kekuatan isi pesan (materi pelatihan) dan latar belakang pendidikan pendamping juga merupakan variabel penting yang berkontribusi terhadap pencapaian pemahaman dan sikap pendamping. Bila ditinjau dari latar belakang pendidikan yang sebagian besar sarjana di bidang pendidikan luar biasa dan konseling (lihat tabel 2), peneliti yakin bahwa asumsi Manstead dan Hewstone (1996) yang menyatakan bahwa penerima pesan yang memiliki tingkat pemahaman tinggi dapat dengan mudah menerima suatu pesan secara kritis.

2. Dampak Metode Pelatihan terhadap Pencapaian Kompetensi

Pendamping

Salah satu kunci keberhasilan suatu proses pelatihan juga tergantung pada metode didaktik yang digunakan selama proses pelatihan berlangsung. Efektivitas suatu pelatihan dalam pencapaian dimensi keyakinan dan sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga melibatkan wilayah pembelajaran afektif (*the affective domain of learning*). Domain yang dimaksud adalah peserta belajar tentang pengaruh status emosional dirinya terhadap materi yang dipelajari. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pelatihan sebagai suatu proses pendidikan sangat bergantung dengan metode dan model didaktis yang digunakan (Kim & Lyons, 2003). Model didaktik yang dimaksud oleh Kim dan Lyons mengacu pada jenis strategi pembelajaran yang berfokus pada asah intelektualitas dan sikap seperti membaca, menulis, dan diskusi Sokrates (*Socratic discussions*).

Sebagaimana telah dideskripsikan pada hasil penelitian, pelatihan ini menggunakan asumsi pendekatan andragogis dan partisipatoris. Metode-metode yang dimaksud, seperti curah pendapat (*brainstorming*), kelompok nominal, diskusi kelompok, dan simulasi. Dari deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian personal peserta dalam keterampilan pendampingan juga sangat ditentukan oleh efektivitas metode dan pendekatan pelatihan yang digunakan.

Sepanjang observasi partisipan yang dilakukan oleh peneliti, antusiasme dan partisipasi aktif peserta menjadi lebih interaktif dan dinamis karena sentuhan metode yang benar-benar menempatkan peserta sebagai pelaku sentral dalam pelatihan tersebut. Kesimpulan ini juga didukung oleh fakta yang terungkap dari angket hasil penelitian yang menunjukkan respon evaluatif peserta yang tinggi terhadap kemampuan metodik fasilitator dalam mengelola pelatihan (87% menilai baik).

Beberapa metode yang digunakan juga dikombinasikan dengan beberapa permainan (*games*) yang menarik. Banyak riset yang membuktikan bahwa permainan-permainan yang merupakan simplifikasi masalah dapat membantu peserta pelatihan mencapai pengalaman yang berarti, meningkatkan motivasi, minat, lebih rileks dan kembali meningkatkan gairah belajar, melibatkan partisipasi peserta, dan membantu pencapaian kepuasan psikologis peserta (Kim & Lyons, 2003). Bentuk games yang dikombinasikan dengan simulasi atau model bermain peran juga sangat membantu pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu. Westwood (Kim & Lyons, 2004) mendeskripsikan bahwa simulasi dan permainan dapat membantu pencapaian keterampilan konseling seseorang dalam suatu proses pelatihan. Sebagaimana dicontohkannya, Westwood menguji serangkaian prosedur tertentu yang disebutnya permainan empati (*the empathy game*). Model ini dilakukan dengan tujuan mengajarkan empati terhadap mahasiswa. Hasil eksperimen yang ia lakukan menunjukkan peningkatan keterampilan empati yang berarti pada beberapa mahasiswa yang ia teliti. Bercermin pada bukti empiris tersebut, tidaklah berlebihan kiranya jika pelatihan ini dapat disebut sebagai tonggak baru dalam pencapaian kemampuan pendamping dalam memahami arti penting konseling dan paralegal dalam pendampingan (lihat FGD, baris 56 – 62). Beberapa peserta secara eksplisit mengungkapkan betapa pengalaman-pengalaman dalam pelatihan telah membawa perubahan yang berarti pada pemahaman mereka tentang pendampingan psikologi melalui konseling. Walaupun demikian, beberapa peserta secara kritis menyatakan bahwa pemahaman mereka tentang prosedur konseling seringkali terpotong-potong dan tidak komprehensif (lihat FGD, baris 77-85). Problem ini muncul karena struktur isi pendalaman konseling dan kasus yang dicontohkan terkesan

fiktif dan kurang menggugah peserta. Mereka berharap kasus-kasus simulasi hendaknya dipersiapkan oleh fasilitator dengan baik dan tidak diserahkan sepenuhnya pada peserta pelatihan.

3. *Lesson Learned* dan Refleksi dari Pengalaman Pelatihan

Berdasarkan temuan-temuan empiris, ada banyak hal yang dipelajari oleh peserta dari pelatihan pendampingan difabel. Pelatihan tersebut memberikan pelajaran penting pada peserta tentang tantangan dalam mendampingi difabel dan bagaimana memperkuat kapasitas difabel melalui kegiatan-kegiatan advokasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses belajar yang mereka lalui sangat praktikal dan sarat dengan muatan belajar dari pengalaman. Oleh karena itu, apa yang mereka pelajari dalam konteks komunitas difabel memiliki dampak dan relevansi langsung terhadap kemampuan mereka. Sebagai pendamping, mereka belajar tentang bagaimana ideologi cacat telah memarjinalkan difabel dari ruang publik, kelemahan rehabilitasi individual yang melanggengkan stigma masyarakat tentang cacat.

Pemahaman pendamping tentang relasi kecacatan dan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat sangat dimungkinkan terjadi karena adanya proses berpikir reflektif dalam suatu pendidikan dan pelatihan tertentu (Thorpe, 2000; Fakhri, 1996; Baiquni, 1999; Sumarto, 2003; Mikkelsen, 2001). Menurut Thorpe (2000, 80), dalam proses belajar dan refleksi yang dilakukan seseorang terkandung hikmah penting berupa, belajar dari pengalaman (*experiential learning*), transformasi cara pandang (*perspective transformation*), metabelajar dan pemantauan kognitif (*cognitive monitoring and metalearning*). Asumsi-asumsi yang terkandung dalam proses berpikir reflektif tersebut juga dapat diamati lebih lanjut pada pencapaian-pencapaian personal peserta dalam konteks penelitian ini. Kritisisme mereka terhadap rehabilitasi kecacatan dan pernyataan capaian pemahaman terhadap model yang berkembang dalam pendampingan advokasi merupakan hasil refleksi pengalaman yang membuahkan tumbuhnya kesadaran kritis dalam diri peserta.

Jika ditinjau lebih jauh dan mendalam terhadap respon-respon pendamping dalam proses evaluasi pelatihan, kesadaran kritis yang dicapai oleh pendamping

lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Mereka menghindari kecenderungan menyalahkan difabel dan secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang tidak berpihak pada difabel (lihat Wcr.B, baris 48-59, 60-68, dan 83-87). Melalui pelatihan ini, mereka dilatih kepekaannya untuk mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, mampu menganalisis bagaimana sistem dan struktur tersebut bekerja, dan mentransformasikannya menjadi nilai-nilai baru.

Proses refleksi pengalaman pendamping ini juga sejalan dengan arus besar teori-teori sikap dalam psikologi sosial dan pendidikan. Dalam kajian psikologi sosial dan filsafat pendidikan, dikenal teori respon kognitif (*cognitive response model*) dan paradigma konstruktivistik dalam belajar (Manstead & Hewstone, 1996; Bacon, 2003). Model yang pertama menegaskan bahwa respon kognitif terjadi manakala muncul dialektika batin antara isi pesan (materi) dan sikap sebelumnya yang telah ada yang pada akhirnya melahirkan pikiran dan ide yang relatif baru. Respon-respon ini memunculkan kekacauan kognitif (*cognitive dissonance*). Kaidah yang berlaku adalah: a). Apabila respon kognitif dominan terhadap suatu sikap (informasi/pesan) yang lama cenderung negatif, maka pesan baru yang masuk lebih efektif merubah sikap seseorang, dan b). Apabila respon kognitif dominan terhadap sikap yang telah ada dalam diri sebelumnya cenderung positif, maka pesan baru yang masuk dianggap tidak cukup efektif merubah sikap seseorang. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, respon kognitif pendamping dalam sesi wawancara dan FGD menunjukkan kecenderungan sikap yang negatif terhadap model rehabilitasi kecacatan sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan sikap pendamping yang menganggap bahwa model pendampingan yang berbasis advokasi merupakan alternatif baru yang lebih baik sangatlah ditentukan oleh respon-respon kognitif pendamping terhadap pemahaman sebelumnya.

4. Pengembangan Rencana Aksi (*action plan*) sebagai Tindak Lanjut Pelatihan

Salah satu unsur penting dalam pelatihan yang jarang tersentuh dalam evaluasi adalah proses penyusunan rencana aksi (action plan) dan implementasinya. Beberapa indikator keberhasilan dalam suatu proses pelatihan dapat diamati pada pencapaian kualifikasi-kualifikasi tertentu (D'Andrea, 2004). Studi yang dilakukan oleh D'Andrea terhadap beberapa mahasiswa pendidikan konseling di Universitas Hawaii telah menerapkan beberapa kualifikasi berikut sebagai indikator keberhasilan program pelatihan. Kualifikasi yang dimaksud, yakni: a) Menghadiri 3 jam minimal pertemuan kelas (tatap muka) seminggu sekali selama 16 minggu; b) mampu menyelesaikan bahan bacaan yang ditugaskan tepat waktu; c) berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas; d) mampu menyelesaikan paper ilmiah yang merefleksikan reaksi partisipan terhadap tugas bacaan dan diskusi kelas; e) menyerahkan proposal rencana aksi yang mendukung implementasi program yang dirancang oleh partisipan; dan f) mampu membuat laporan evaluasi yang mendeskripsikan dampak implementasi rencana aksi.

Lebih lanjut D'Andrea menjelaskan bahwa rencana aksi dan laporan evaluasi diri (self-report) merupakan aktivitas kunci yang didisain dengan tujuan dan maksud tertentu. Melalui aktivitas-aktivitas kunci ini, partisipan dalam suatu proses pendidikan dan pelatihan akan memperoleh dukungan teknis dalam hal pengimplementasian program dan dengan sendirinya mereka mampu mengukur dampak lebih lanjut dari usaha-usaha yang telah mereka lakukan. Dalam konteks penelitian evaluasi ini, beberapa kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh pendamping pascapelatihan, baik itu sosialisasi, dialog interaktif, advokasi kebijakan, pembentukan tim kerja, konferensi kasus, sampai dengan penanganan satu kasus pelecehan seksual terhadap difabel (lihat tabel) dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelatihan.

Asumsi teoretis yang digagas oleh D'Andrea dan temuan penelitian ini juga bersesuaian dengan tesis yang diajukan oleh Kirkpatrick, bahwa selain komponen reaksi peserta, kemampuan belajar, dan perubahan perilaku peserta, suatu program pelatihan dapat dianggap sukses jika dampak kegiatan juga dirasakan oleh komunitas dampingan atau pihak pengguna lainnya (Kirkpatrick, 1996). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui rencana aksi dan

tindak lanjut pelatihan yang dikembangkan oleh pendamping tersebut, setidaknya terdapat beberapa hasil positif yang dapat dipetik, yakni:

- a. menumbuhkan keberanian pendamping untuk bergerak atau pindah dari teori menuju praktik empiris dengan menggunakan pemahaman mereka dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan model pendampingan advokasi
- b. pendamping dapat belajar lebih jauh tentang bagaimana cara mengembangkan strategi-strategi implementasi yang tepat untuk komunitas yang mereka dampingi
- c. pendamping dapat menumbuhkan jiwa solidaritas dan kohesivitas sosial antarpending dalam membangun jaringan aksi bersama. Kekuatan perubahan terletak pada soliditas jaringan yang terbangun. Dengan kekuatan ini capaian perubahan dapat direncanakan tidak hanya sebatas perubahan individu yang didampingi, tetapi juga sampai pada terakomodasinya kebutuhan komunitas dalam sistem atau kebijakan.
- d. Pendamping dapat berperan sebagai *multiflier effect* atau menularkan kemampuannya melalui pendekatan sosialisasi massif maupun pelatihan-pelatihan dalam ruang lingkup yang kecil dan terbatas
- e. Dari hasil rencana aksi yang dilakukan, pendamping dapat memperoleh data-data asesmen yang memadai untuk mengukur sendiri tingkat pencapaian tindak lanjut yang dilakukan (self-report). Kebutuhan database dapat dijadikan sebagai salah satu data pendukung dalam perencanaan selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Materi dan metode pelatihan yang diterapkan dalam pelatihan memberikan kontribusi positif terhadap perubahan sikap pendamping yang cenderung memilih pendampingan difabel berbasis advokasi. Kontribusi tersebut dapat diamati pada hubungan simetris antara alur pelatihan pertama yang ditindaklanjuti pada alur pelatihan kedua dan ketiga. Materi yang ditampilkan pada pelatihan pertama lalu

dikembangkan dalam pelatihan kedua dan ketiga. Selain itu, metode pelatihan juga berperan penting dalam perubahan sikap pendamping.

Terkait dengan *lesson learned* dan yang dipelajari oleh pendamping dan bagaimana mereka merefleksikannya, studi ini memberikan gambaran penting bahwa pelatihan ini memberikan pelajaran penting pada peserta tentang tantangan dalam mendampingi difabel dan bagaimana memperkuat kapasitas difabel melalui kegiatan-kegiatan advokasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses belajar yang mereka lalui sangat praktikal dan sarat dengan muatan belajar dari pengalaman. Oleh karena itu, apa yang mereka pelajari dalam konteks komunitas difabel memiliki dampak dan relevansi langsung terhadap kemampuan mereka. Sebagai pendamping, mereka belajar tentang bagaimana ideologi cacat telah memarjinalkan difabel dari ruang publik, kelemahan rehabilitasi individual yang melanggengkan stigma masyarakat tentang cacat.

Beberapa kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh pendamping pascapelatihan, baik itu sosialisasi, dialog interaktif, advokasi kebijakan, pembentukan tim kerja, konferensi kasus, sampai dengan penanganan satu kasus pelecehan seksual terhadap difabel dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelatihan ini. Kegiatan tindak lanjut yang disebar di beberapa kabupaten Yogyakarta selain menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai pendampingan yang disepakati bersama, juga sebagai refleksi nyata antusiasme mereka yang tinggi untuk terus belajar dan menambah wawasan dari forum pertemuan yang sifatnya rutin dan berkala. Kesimpulan ini dapat dilihat pada salah satu bentuk aktivitas tindak lanjut yang dilakukan oleh pendamping adalah berupa kegiatan konferensi kasus yang dikembangkan dalam bentuk kelompok belajar bersama.

Terkait dengan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, terkait dengan materi dan metode pelatihan serta dampaknya terhadap perubahan sikap pendamping, pelatihan pendampingan difabel ini perlu dikembangkan menjadi wadah yang inklusif. Upaya ini perlu dilakukan untuk menutup kelemahan-kelemahan dalam pelatihan yang telah diselenggarakan. Dari sudut materi, misalnya, pascapelatihan perlu mengundang praktisi dan pakar rehabilitasi kecacatan yang telah berjalan selama

ini. Selama proses pelatihan, materi dan fasilitator yang membawakan materi justru belum merepresentasikan gambaran pelaksanaan rehabilitasi, karena pengalaman fasilitator hanya terbatas pada kemampuan advokasi saja. Melalui kegiatan pascapelatihan, perlu dibangun dialog yang intens antara praktisi rehabilitasi dan praktisi pendampingan advokasi. Harapannya, pemahaman pendamping lebih meningkat dan komprehensif, dan pada akhirnya perubahan-perubahan sikap dan kompetensi pendamping pun dapat terkristalisasi dengan baik pula.

Kedua, saran yang kedua terkait erat dengan refleksi pengalaman peserta dalam memahami rehabilitasi dan advokasi. Kritik dan identifikasi permasalahan difabel yang dipahami oleh peserta dan materi yang diberikan oleh fasilitator terkait rehabilitasi tersebut perlu didukung oleh fakta dan data yang jelas. Untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan yang tepat, model rehabilitasi perlu dikaji secara empiris dan mendalam melalui penelitian-penelitian ilmiah, seperti survey atau evaluasi pelaksanaan model rehabilitasi di beberapa tempat tertentu. Cara ini perlu dilakukan agar kesimpulan peneliti tentang urgensi pendampingan advokasi juga ditopang oleh hasil perbandingan yang setara antara model rehabilitasi dan pendampingan berbasis aksi advokasi.

Ketiga, kegiatan sosialisasi dan tindak lanjut pelatihan perlu ditingkatkan menuju tahapan-tahapan yang lebih tinggi dan tidak hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi saja. Tim kerja pendampingan difabel yang dihasilkan dari pelatihan bersama Dria Manunggal dan Rifka Annisa perlu mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh difabel dalam skala besar di DIY. Target utama yang perlu dicapai adalah usaha-usaha ekstensif untuk mempengaruhi kebijakan publik di tingkat provinsi ataupun daerah. Sebagai contoh, kelompok kerja advokasi difabel di Kota Solo, Jawa Tengah bersama dengan beberapa unsur anggota dewan kota telah berhasil merumuskan *legal drafting* raperda (rancangan peraturan daerah) kesetaraan difabel. Melalui upaya *legal drafting* ini diharapkan penanganan dan advokasi difabel memiliki proteksi hukum yang jelas dan jaminan pemenuhan kebijakan yang akomodatif dan serta aksesibel bagi difabel. Kegiatan-kegiatan pengembangan lebih lanjut semaksimal mungkin juga perlu diarahkan pada pengembangan jaringan (network) yang lebih luas dan bervariasi. Dalam rangka

mendiseminasikan ide inklusi sosial secara luas, perlu dibangun sinergi bersama antar kelompok mandiri difabel, dengan organisasi rehabilitasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan terutama kalangan perguruan tinggi yang memiliki perhatian terhadap pendidikan luar biasa bagi difabel. Permasalahan selama ini membuktikan bahwa ide difabel kurang tersosialisasikan dengan baik, karena tiap-tiap lembaga hidup dan beraktivitas dengan paradigma dan ideologi masing-masing. Perlu dibangun satu kerangka kerja dan visi bersama bahwa difabel perlu memperoleh dukungan dan aksesibilitas yang setara dengan orang-orang normal pada umumnya.

REFERENSI

- Altholz, S., & Golensky, M. (2004). Counseling, Support, and Advocacy for Clients Who Stutter, *Health and Social Work*, 29(3), p. 197-205
- Angelique, H. L., Reischl, T. M., & Davidson, W. S. (2002). Promoting Political Empowerment: Evaluation of an Intervention with University Students, *American Journal of Community Psychology*, 30(6), 815-833
- Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., & Hilgard, E. R. (1983). *Introduction to Psychology*, London: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Bacon, B. J. T. (2003). More or Less On Metaphor, *Studies in Philosophy and Education*, 22:139-143
- Baiquni, M. (1999). *Participatory Rural Appraisal; Metode dan Teknik Partisipatif dalam Pengembangan Pedesaan*, Paper disimulasikan dalam Pelatihan Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan, Program Studi Magister Administrasi Publik, UGM
- Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (1999). *Psikologi Lintas Budaya; Riset dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia
- Bierman, D. (1997). *Disabled by Economic Transition?; An Analysis of Rehabilitation Services for Disabled People in the Context of Economic Transition in Vietnam*, Nijmegen: Catholic University of Nijmegen
- Breu, K., & Peppard, J. (2003). Useful Knowledge for Information Systems Practice: the Contribution of the Participatory Paradigm, *Journal of Information Technology*, 18, 177-193
- Chalker, P., & Wirz, S. (1999). The Relationship between Inclusive Education and Community Based Rehabilitation, *Associate Publication of Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, 2(1), p. 11-17
- D'Andrea, M. (2004). Comprehensive School-Based Violence Prevention Training: A Developmental- Ecological Training Model, *Journal of Counseling and Development*, Vol. 82, Summer 2004, p. 277-286
- Deacon, S. A., & Piercy, F. P. (2000). Qualitative Evaluation of Family Therapy Programs; A Participatory Approach, *Journal of Marital and Family Therapy*, 26 (1), p. 39-45
- Dell Orto, A. E., & Marinelli, R. P. (1995). *Encyclopedia of Disability and Rehabilitation* (Eds.), New York: Simon & Schuster and Prentice Hall International
- Dria Manunggal, 2003. Profil Lembaga Dria Manunggal, tidak dipublikasikan.

- Fakih, M. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergerakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, M., Topatimasang, R., & Rahardjo, T. (2001). *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Read Book
- Feldman, P., & Orford, J. (1980). *Psychological Problems; the Social Context*, Chicester: John Wiley & Sons
- Flick, U. (2002). *An Introduction to Qualitative Research*, London: Sage Publications
- Freire, P., (2001). Pendidikan yang Membebaskan dan Pendidikan yang Memanusiakan (*dalam Menggugat Pendidikan*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Galassi, J. P., & Akos, P. (2004). Developmental Advocacy: Twenty-First Century School Counseling, *Journal of Counseling & Development*, Vol. 82/Spring 2004, p. 146-157
- Kartadinata, S. (2001). Reaktualisasi Paradigma Bimbingan dan Konseling dan Profesionalisasi Konselor, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, IV(7), 3-17
- Keefer, M. (2002). Designing Reflections on Practice: Helping Teachers Apply Cognitive Learning Principles in an SFT-Inquiry-Based Learning Program, *Interchange Journal*, Vol. 33/4, p. 395-417
- Kiselica, M. S., & Robinson, M. (2001). Bringing Advocacy Counseling to Life; The History, Issues, and Human Dramas of Social Justice Work in Counseling. *Journal of Counseling and Development*, Vol. 79, Fall 2001, p. 387-397
- Kim, B. S. K., & Lyons, H. Z. (2003). Experiential Activities and Multicultural Counseling Competence Training, *Journal of Counseling and Development*, Vol. 81, Fall 2003, p. 400-408.
- Koentjoro. (2004). *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Penerbit Tinta
- Koentjoro. (2005). *Arti Penting Perubahan Paradigma dan Pendekatan dalam Pembelajaran dan Penerapan Psikologi Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Psikologi Sosial pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Komardjaja, I. (2005). *Empowering Disabled Women through Economic Development; The Role of NGO*, Bandung; Unpublished Paper
- Krueger, R. A. (1988). *Focus Groups; A Practical Guide for Applied Research*, Newbury Park, California: Sage Publications
- Manstead, A. S. R., & Hewstone, M. (1996). *The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology*, Oxford: Blackwell Publisher
- Marcoes, L., Juliantara, D., & Wahono, F. (2004). *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih; Refleksi Kawan Seperjuangan* (Eds.), Yogyakarta: Sigab dan OXFAM Great Britain
- McLeod, J. (2001). *Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy*, London: Sage Publications
- Mikkelsen, B. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan; Suatu Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods*, California: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, N. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Orford, J. (1992). *Community Psychology; Theory and Practice*. Chicester: John Wiley and Sons.
- Penzhorn, C. (2002). The Use of Participatory Research as an Alternative Approach for Information Needs Research, *Aslib Proceedings*, 54(4), p. 240-248
- Peters, S. (2004). *Pendidikan Bagi Semua- Bersama; Termasuk Anak-anak Penyandang Cacat*, Serial Working Papers, www.worldbank.org/education/

- Rahman, F. (2005). *Voluntarisme Sosial; Agenda Kerja Konseling Advokatif dalam Mengatasi Problem Ketidakseimbangan Sosial*, Paper dipresentasikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Semarang 13-16 April 2005
- Strauss, A., & Corbin, J. (1997). *Basics of Qualitative Researc; Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, Thousand Oaks, London: Sage Publications.
- Sumarto, S. H. (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance; 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suseno, J. (2004). Mereka yang Terlupakan dan Terabaikan, www.pushamuii.org
- Tarsidi, D. (1998). *Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat* (Trans.), Resolusi PBB No. 48/96, Tahun 1993
- Thorpe, M. (2000). Encouraging Students to Reflect as Part of the Assignment Process, *Active Learning in Higher Education*, Vol. 1(1), p. 79-92
- World Health Organization. (2004). *Community- Based Rehabilitation; A Strategy for Rehabilitation, Equalization of Opportunities, Poverty Reduction and Social Inclusion of People with Disabilities*, Geneva: Joint Position Paper 2004